

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG *ROADMAP* NUSA TENGGARA BARAT HALAL *INDUSTRIAL PARK*  
TAHUN 2022-2025

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan beberapa peraturan daerah (Perda) dalam mempercepat perekonomian berbasis Industri. Pertama Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021-2024. Tujuannya untuk memayungi setiap *stock holder* sebagai pelaku industri yang sejalan dengan pembangunan perindustrian nasional, industri daerah yang maju, berdaya saing dan mandiri serta kepastian berusaha. Peraturan kedua adalah Perda No.3 tahun 2020 terkait pembangunan ekonomi kreatif. Pembangunan ekonomi kreatif merupakan pembangunan industri kreativitas berbasis IT, Seni dan Budaya. Dengan demikian, payung hukum terkait pembangunan industri cukup lengkap di NTB.

Lahirnya dua peraturan daerah tersebut belum sejalan dengan percepatan industrialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara deskriptif dapat diamati dari share sektor industri terhadap PDRB NTB yang masih relatif kecil, yaitu 4 persen di tahun 2020 dan 2021 (BPS, 2022). Bila diamati dari jumlah UMKM berdasar klasifikasi usaha, UMKM di NTB masih didominasi usaha mikro dan kecil. Berdasar data 2021 dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, pada 2021 dari total 103.284 jumlah UMKM, terdapat 86.922 unit (84,16 Persen) berupa usaha mikro dan 15.119 (14,6 persen) adalah usaha kecil. Sementara itu, usaha menengah hanya 1243 (1,2 persen). Hal ini menunjukkan proses UMKM naik kelas masih relatif lamban.

Dari data penanaman modal dari DKPMPT-SP juga menunjukkan hal yang sama yaitu masih rendahnya pertumbuhan investasi sektor industri. Realisasi investasi dalam skema PMDN (Penanaman Modal Dalam negeri) adalah sebesar 7,65 persen di tahun 2020, menurun menjadi 1,67 persen dari total PMDN di tahun 2021. PMA (penanaman modal asing atau PMA mengalami trend yang sama yaitu menurun dari 0,10 persen di tahun 2020 menjadi 0,04 dari total PMA di tahun 2021. Memang diakui perlambatan penanaman modal adalah disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun tersebut. Namun, angka kontribusi sektor industri/ perindustrian relative kecil dibanding dengan sektor lainnya.

Melihat perkembangan beberapa tahun di atas, perlu ada strategi lain dalam

mempercepat pertumbuhan

*road map* dalam rangka mempersiapkan pembangunan kawasan industri halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **Maksud dan Tujuan**

Road map NTB HIP dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam lingkup Provinsi NTB, dunia usaha dan industri dan berbagai pihak terkait dalam membangun berbagai tahapan kawasan industri halal.

Adapun tujuan *road map* adalah untuk menyiapkan kerangka kerja perencanaan pembangunan kawasan industri halal yang sesuai dengan tata ruang dan didukung infrastruktur dan kelembagaan serta berwawasan lingkungan di lingkup daerah Nusa Tenggara Barat. Hal ini diharapkan mampu menarik investasi, mengatasi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup bahasan dalam *road map* NTB HIP terdiri dari:

1. Pendahuluan, yang berisi latar belakang pentingnya pembangunan kawasan industri halal di NTB
2. Gambaran Umum potensi pengembangan kawasan industri halal di NTB
3. Konsep Halal Industrial Park yang berisi pembahasan kawasan industri dalam perspektif literatur dan peta serta entitas yang berperan dalam kawasan.
4. Road map NTB HIP yang terdiri dari tahap persiapan, pembangunan dan pengelolaan.
5. Penutup yang berisi saran dalam mempercepat pembangunan NTB HIP.



































































